

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**Direktorat Jenderal
Pajak**

Layanan Informasi &
Pengaduan: (021) 1500200 ◆
informasi@pajak.go.id ◆
pengaduan@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**

Nomor : BPE-
BPE 12176/CT/KPP.1410/2026
Tanggal : 02 Februari 2026

NPWP : 6472033008820008

Nama
Wajib Pajak : AGUS JOKO PRASETYO

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun
Pajak : 2025

Masa
Pajak : September - Desember
2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima : 02 Februari 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN

2508L6SF8

PERIODE PENGHASILAN

09-2025-12-2025

SIFAT PEMOTONGAN

TIDAK FINAL

STATUS BUKTI PEMOTONGAN

NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 6472033008820008
A.2 Nama : AGUS JOKO PRASETYO
A.3 Alamat : JALAN SIRAD SALMAN NO.72
A.4 NIP/NRP : 198208302025211023
A.5 Jenis Kelamin : Pria
A.6 Pangkat/Golongan : IX
A.7 Status PTKP : TK0
A.8 Posisi : PPPK
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01
B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	12.814.400
2.	Tunjangan Istri	0
3.	Tunjangan Anak	0
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	0
6.	Tunjangan Beras	0
7.	Tunjangan Lain-lain	289.680
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dari Pembayaran Gaji	0
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	13.104.080
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	655.204
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	655.204
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	12.448.876
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	12.448.876
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	0
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	0
20.	PPh Pasal 21 Terutang	0
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	0
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP : 0001138577741000
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : 0001138577741000000000 - PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.3 Nama Pemotong : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.4 Tanggal : 18 Januari 2026
C.5 Nama Penandatanganan : YESICA SINAGA
C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah